

MALAISE DAN PENGARUHNYA TERHADAP GERAKAN NASIONAL INDONESIA

Bachtiar Akob & Teuku Junaidi

Penulis Pertama dan Kedua adalah Staf Pengajar pada Prodi Pendidikan Sejarah,
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,
Universitas Samudra, Langsa
bachtiarakob@gmail.com & t.junaidiunsam@gmail.com

Abstrak

Sepanjang sejarah perekonomian, malaise merupakan krisis ekonomi dunia yang memuncak pada tahun 1929 sebagai dampak dari Perang Dunia I (1914-1918). Hancurnya tatanan ekonomi dunia berdampak langsung terhadap Hindia Belanda, baik dalam bidang sosial, ekonomi, maupun politik. Fenomena ini berpengaruh pada organisasi-organisasi Pergerakan Nasional dalam melawan penguasa. Artikel ini menggunakan metode historis melalui penelahan buku-buku yang dilakukan secara bertahap. Dari pengumpulan sumber, kritik sumber, interpretasi hingga historiografi. Terjadinya malaise dilatar belakangi oleh Perang Dunia I. Banyak negara menjadi miskin, lenyapnya daerah-daerah pemasaran, daya beli lemah, kelebihan produksi, dan pengangguran bertambah. Sejalan dengan peristiwa sejarah tentang inflansi ini mulailah krisis ekonomi melanda dunia. Di Indonesia, Fenomena ini dijadikan peluang oleh organisasi Pergerakan Nasional untuk menghimpun kaum buruh melakukan aksi-aksi politik sebagai bentuk perlawanan terhadap Pemerintah Hindia Belanda dalam mewujudkan Indonesia merdeka.

Kata Kunci: *Malaise, Pergerakan Nasional*

I. Pendahuluan

Sejarah Perekonomian pada dasarnya mempejajari dua hal pokok. Pertama, menyangkut dengan pertumbuhan ekonomi (stagnasi atau kemunduran). Peristiwa-peristiwa sejarah yang berhubungan dengan faktor-faktor penyebab yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi baik stagnasi ataupun kemunduran ekonomi. Kaedua distribusi, yaitu pendapatan pada aktivitas ekonomi selama proses pertumbuhan atau kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen kepada konsumen. Sedangkan fokus sejarah perekonomian merupakan proses pertumbuhan atau kemunduran ekonomi dan kesejahteraan sesuatu masyarakat di masa lampau. Oleh sebab itu, mempelajari sejarah perekonomian bisa memberikan gambaran masa lampau untuk diambil hikmahnya. Aulia Rahman dan Hanafiah (2014) menganjurkan kepada pembaca "peristiwa masa lampau yang bersifat positif dapat diambil manfaatnya untuk diterapkan pada masa sekarang dan pada masa yang akan datang".

Salah satu peristiwa masa lampau yang dapat diambil hikmahnya adalah krisis ekonomi dunia atau sering diistilahkan dengan *malaise* yang terjadi pada tahun 1929. Salah satu faktor penyebab terjadinya malaise merupakan akibat dari Perang Dunia I (1914-1918) yang berkecamuk di daratan Eropa. Perang Dunia I menimbulkan malapetaka besar bagi umat manusia, seperti kemiskinan, kelebihan

produksi, terhambatnya pemberian kredit dan kekacauan pembayaran. Keadaan ini menyebabkan krisis ekonomi dunia baik di Eropa, Asia pada umumnya maupun Indonesia pada khususnya.

Soekarno (1965:596) terjadinya malaise diakibatkan oleh "hilangnya daerah pemasaran barang-barang industri, sejumlah barang-barang dagangan tidak dapat dipasarkan lagi karena banyak pasar di dunia menjadi lesu dan terhenti. Daya beli merosot dan sukar sekali mencari pasar-pasar baru. Keadaan yang demikian rupa juga melanda perekonomian Indonesia. Pemerintah Kolonial Belanda sangat bergantung pada nilai ekspor hasil perkebunan, terutama tebu, tembakau, karet dan berbagai hasil tambang lainnya. Keadaan ini berdampak serta dirasakan oleh rakyat Indonesia. "Meskipun krisis mengganas dalam masyarakat daerah jajahan, namun Pemerintah Kolonial tidak banyak berusaha untuk mengatasinya" (Prisma, No. 8 1983 : 37). Bahkan pemerintah dengan sengaja menekan para petani. Pengangguran dalam masa krisis ekonomi karena telah dipecat dari pekerjaannya menyebabkan banyak menimbulkan kerusuhan dan kejahatan.

Meningkatnya pengangguran dikalangan kaum buruh dimanfaatkan oleh organisasi Pergerakan Nasional, terutama yang berhaluan komunis seperti Serikat Buruh Kereta Api, Serikat Buruh Percetakan, Serikat Buruh Pelabuhan dan Serikat Rakyat untuk menentang Pemerintah Kolonial Belanda (AK. Pringgodigido, 1980 : 84). Organisasi-organisasi Pergerakan Nasional Indonesia, terutama organisasi yang berhaluan keras (radikal) seperti Indische Parti, Partai Komunis Indonesia, Partai Nasional Indonesia. Perhimpunan Indonesia semakin berpeluang mencapai cita-cita kemerdekaan Indonesia sesuai dengan azas dan tujuan organisasi tersebut. Berdasarkan uraian di atas, maka muncullah problematik "bagaimana pengaruh malaise terhadap Pergerakan Nasional Indonesia.

II. Munculnya Malaise

A. Akibat Perang Dunia I (1914-1918)

Dengan berakhirnya Perang Dunia I pada tahun 1918 maka segera terlihat berbagai perubahan-perubahan yang terjadi di dunia, antara lain perubahan teritorial, faham-faham politik, serta perubahan ekonomi yang melanda dunia (Soebantardjo, 1960 : 169). Perubahan yang terjadi dalam lapangan ekonomi akibat Perang Dunia I (1914-1918) karena negara-negara yang tampil sebagai pemenang menuntut kerugian perang. Misalnya saja Jerman harus membayar 132 milyar mark emas kepada Inggris dan semua kapal dagang Jerman diambil oleh Inggris sehingga Jerman tidak sanggup membayar ganti rugi perang karena tidak lagi mempunyai industri dan peralatan dagang. Akibat perilaku perang semacam ini menyebabkan munculnya faham-faham politik ekonomi, Komunisme Rusia, Facisme Italia, Nasional Sosialisme Jerman (Soebantardjo, 1960 : 169).

Setelah berakhirnya Perang Dunia I, banyak sekali negara yang menjadi miskin dan ekonomi dunia mengalami kekacauan hebat disebabkan karena : (a) Industri pada umumnya telah berubah fungsi menjadi industri perang. (b) Industri kehilangan pasarnya. (c) Urusan keuangan sama sekali tidak lancar. (d) Biaya perang harus dilunasi. Keadaan semacam itu diatasi dengan mengeluarkan uang kertas baru, sehingga mengakibatkan perekonomian dunia mengalami kekacauan dan terjadinya inflasi (Suroyo Warsid, 1953 : 198). Perubahan-perubahan besar juga terjadi dalam mata uang karena penawaran terlalu besar dibandingkan dengan

permintaan. Nilai tukar uang tidak seimbang, terutama mata uang Jerman, Austria dan Perancis. Di Jerman pada masa puncak krisis nilai tukar dollar Amerika Serikat adalah 4.000.000.000 mark Jerman (Soekarno, 1965 :599). Pada tahun 1925 seperti yang terjadi di Perancis, juga terjadi di negara Eropa lainnya. Kekacauan ekonomi berakibatkan nilai Prance dibandingkan dengan uang asing merosot tajam sehingga mengakibatkan harga barang mengalami inflasi. Sejalan dengan peristiwa sejarah tentang inflansi ini mulailah krisis ekonomi melanda dunia.

Lain pula halnya dengan Amerika Serikat yang pada masa Perang Dunia I mengalami masa keemasan. Produksinya menjadi berlipat ganda dan keuntungan pun diperoleh semakin banyak. Kemajuan industri baru Amerika Serikat pasca perang mengantarkan Amerika Serikat ke puncak kejayaan. memegang peranan penting dalam faktor ekonomi dunia karena kemajuan industrinya. Dalam konterks tersebut, Hindia Belanda (Indonesia) mampu memanfaatkan keadaan tersebut dimana volume perdagangan Indonesia dengan Amerika Serikat meningkat dalam melayani permintaan bahan-bahan mentah buat industri Amerika Serikat. Hubungan semakin dekat dan rapat akan permintaan hasil ekspor Indonesia jauh lebih meningkat dibandingkan dengan sebelum perang. Munculnya industri mobil setelah Perang Dunia I menyebabkan bertambah besar pula permintaan aluminium dari Indonesia dan hasil-hasil lainnya (Prajudi Atmosudirdjo, 1970 : 14).

Dampak yang ditimbulkan akibat munculnya industri-industri baru Amerika Serikat adalah *over producsi* (kelebihan produksi). Sementara daya beli dari negara-negara konsumen makin lama makin lemah. Kenyataan ini pada bulan November 1929, perekonomian Amerika Serikat mengalami kegoncangan hebat, di sana sini terjadi pailit (bangkrut) yang menyebabkan di bursa terjadi obralan secara besar-besaran. Penjualan barang-barang industri terhenti, ongkos pengangkutan turun drastis, pengangguran bertambah banyak dan pertanian pun mengalami kerugian-kerugian yang tidak sedikit. Salah satu akibat dari pengangguran yang semakin meningkat, banyak pengusaha-pengusaha mencari jalan keluar dengan berbagai cara, misalnya saja mencoba menurunkan ongkos produksi dengan jalan mencari metode-metode baru untuk mengurangi tenaga kerja (Suroyo Warsid, 1953 : 226).

Lain pula halnya yang dialami oleh Tiongkok dan Jepang. Kalau Jepang hampir sama dengan Amerika Serikat, akan tetapi Tiongkok mengalami kesulitan ekonominya itu karena 80 % dari penduduk Tiongkok yang berjumlah 420.000.000 jiwa adalah petani-petani kecil yang masih memegang tradisi secara lokal dan mengikuti kebiasaan-kebiasaan leluhurnya, sehingga sukar sekali untuk bisa membebaskan rakyatnya dari belenggu ekonomi, salah satu jalan dengan memodernisir sendiri. Usaha Tiongkok untuk memodernisir sendiri merupakan tantangan yang cukup besar, karena tuan-tuan tanah mendapat bantuan dari negeri-negeri asing, sehingga pihak yang berkuasa sukar untuk memperbaiki ekonomi negaranya. Hal ini bertepatan pula adanya pengaruh Eropa dan Amerika Serikat yang bersaing dengan imperialisme Jepang di Tiongkok. Pada akhirnya Jepang juga mengalami nasib seperti Amerika Serikat, tetapi tidak semua industri yang menyebabkan ekonomi Jepang menurun. Dimana industri besi, baja dan senjata masih tetap menguntungkan. Namun demikian Jepang tetap merasakan kegoncangan ekonomi akibat gempa bumi pada 1927, serta krisis ekonomi dunia pada tahun 1929 (Suroyo Warsid, 1953 : 233).

Keadaan ekonomi sebagaimana yang telah diterangkan di atas menurut Soekarno (1953 : 590) "kapitalisme yang menaik adalah penuh dengan kesuburan, penuh dengan kesehatan, penuh vitalitas, tetapi kapitalisme yang menurun adalah

penuh penyakit tanda-tanda keripuhan. Ia tidak lagi sehat, tidak lagi subur dan kurang vitalitas". Perbandingan keadaan ekonomi sebelum perang dan sesudah Perang Dunia I, jelas tampak bahwa kapitalisme menurun disebabkan oleh peperangan dan ditimpa krisis pada tahun 1921, dan malaise pada tahun 1929. Dengan demikian krisis selalu menyerang tubuh kapitalisme. Ia tidak lagi sanggup menahan pukulan krisis seperti yang menimpa Eropa, Amerika, Asia, bahkan sampai ke Indonesia.

Negara-negara yang mengalami krisis ekonomi sukar untuk menuju kembali seperti keadaan sebelum Perang Dunia I atau membangkitkan kembali ekonomi secara permanent untuk menuju masa subur. Setelah di timpa krisis demikian kauat, ternyata berbagai langkah dan cara terus dihadapi baik dengan penurunan harga maupun secara membatasi produksi. Masyarakat pada saat krisis ekonomi dunia terjadi seakan-akan tidak mempunyai tenaga lagi untuk mengobati kesembuhan ekonominya sendiri.

B. Lenyapnya Daerah Pemasaran Barang-barang Industri

Perang Dunia I (1914-1918) mengakibatkan kekacauan ekonomi yang luar biasa, dimana tempat-tempat yang menjadi sasaran hasil produksi kini kehilangan pasarnya. Beberapa negara di dunia telah menjadi miskin karena peperangan, misalnya Jerman, Austria dan Rusia, ekonomi kucar kacir, pertentangan-pertentangan terjadi untuk merebut daerah pemasaran baru, tempat-tempat penjualan baru untuk barang-barang dagangan. Keinginan untuk mendapatkan daerah pemasaran baru untuk memperbaiki ekonomi yang telah hancur sangat sukar didapat (Soekarno, 1965: 592).

Malaise telah menimpa berbagai negara di dunia, seperti Jerman sudah tidak sanggup lagi membayar kerugian perang, sedangkan tempat-tempat menguntungkan sebagai pusat hasil pertambangan batu bara dan industri baja di Ruhr telah diduduki oleh Perancis. Untuk mencapai keadaan yang demikian sangat sulit, bermacam-macam cara dilakukannya namun hasilnya juga tidak membaik, malah bertambah parah. pasar perdagangan Jerman makin panik, kucar kacir dan runtuhnya urusan bank di Amerika Serikat. Barang-barang industri kehilangan tempat pemasarannya. Akhirnya Jerman memperkecil pasar-pasar penjualan.

Perang Dunia I menimbulkan kekacauan ekonomi yang luar biasa di dunia, Eropa, Amerika, bahkan sampai ke Indonesia. Nasionalisme ekonomi menciptakan bea masuk yang tinggi dan menghentikan perdagangan internasional, maka timbullah kelebihan produksi di beberapa negara seperti USA, Brazilia, Canada, sehingga terjadilah kekurangan di negara lain. Kelebihan produksi mengakibatkan tertutupnya pabrik-pabrik dan menimbulkan pengangguran, akhirnya meletus dalam depresi ekonomi tahun 1923 dan tahun 1929-1930 yaitu masa malaise (Soebantardjo, 1960 : 170). Malaise yang di alami oleh negara-negara yang gelombang ekonomi pasang surut, tenggelam pemasarannya, bertambahnya pengangguran bahkan di negara yang paling hebat produksinya justru disitulah yang paling hebat pula jumlah buruh yang tidak mendapat pekerjaan seperti di Amerika Serikat, Inggris, Jerman dan berjuta-juta kaum buruh mengalami nasib malang (Soekarno, 1965 : 594).

Pada krisis 1925 Jerman banyak menggunakan modal asing. Amerika yang memberi pinjaman kepada Jerman untuk memajukan industri dan perdagangannya. Berhubungan dengan adanya krisis ekonomi dunia pada tahun 1929 Amerika meminta kembali pinjaman tersebut dan menetapkan jumlah kerugian perang. Pembayaran

kerugian Jerman dikurangi menjadi 26,5 % milyar mark dan harus dilunasi dalam 60 tahun (Soebantardjo, 1960: 179). Malaise tahun 1929 melemahkan sama sekali seluruh tubuh para kapitalis yang sejak permulaan abad ke 20 memang sudah dalam keadaan pasang surut ekonomi akibat Perang Dunia I. bertahun-tahun lamanya keadaan seperti ini mengakibatkan kemampuan daya beli di pasar-pasar merosot ke bawah. Kemampuan pembeli menjadi minimal dan sukar sekali mencari pasar-pasar baru. Sementara diantara para kapitalisme menyalahkan satu sama lainnya, berputar dalam satu lingkungan kerugian yang tidak dapat melepaskan lagi dari padanya.

Suatu perbandingan antara Jerman dan Inggris pada masa sebelum peperangan terjadi, dua industrialisasi mulai bersaing satu sama lain. Jerman punya industri mekar dan pasar-pasar dunia sukar di jangkau baginya, sukar sekali dicapai sebagaimana produksinya. Sedangkan Inggris cukup banyak pasarnya, cukup banyak daerah jajahannya dan sekaligus memakai hasil produksinya, akan tetapi Jerman punya tanah jajahan yang paling berarti yaitu Afrika Barat (Kamerun) hanya dapat menelan 0,5 persen saja dari jumlah ekspor dan Inggris dapat memakan f. 21.000.000.000 di dalam tanah jajahannya (Soekarno, 1965: 599). Kedua negara tersebut bersaing ketat baik dari segi kualitas maupun pemasarannya. Tidak lama kemudian pecah Perang Dunia I, sehingga Jerman mengalami nasib yang buruk. Bukan memberi daerah pemasaran baginya tetapi merampas pasar yang sudah ada.

Untuk mengimbangi pasaran import-eksport lesu setelah Perang Dunia I seperti yang telah dibicarakan di atas. Masalah produksi barang-barang ekspor selalu diperbesar dengan tujuan mencapai hasil yang sama sebelum datangnya krisis, namun tujuan tersebut tidak tercapai karena kemerosotan harga. Harga ekspor jauh lebih tinggi dari pada harga import, sedangkan keperluan hidup rakyat sebagian besar dari barang-barang import. Akhirnya apa yang diharapkan sebelumnya jauh dari kenyataan (Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta, 1979/1978: 124).

Negara-negara yang mengalami krisis, sangat sulit untuk menciptakan ekonomi normal. Persaingan-persaingan terjadi untuk merebut tempat-tempat penjualan barang industri yang telah menumpuk akibat terjadinya kelebihan produksi. Kini tidak ada tempat penjualan baginya untuk menutupi masa krisis ekonomi. Bukan menciptakan keuntungan yang diperoleh dari hasil produksi setelah dipasarkan. Bahkan tempat-tempat pemasaran yang sudah ada semuanya menjadi lesu dan terhenti penjualannya.

III. Pengaruh Malaise Terhadap Indonesia

A. Malaise di Indonesia

Menjelang terjadinya krisis ekonomi dunia, keadaan ekonomi Indonesia sedang berkembang karena hasil ekspor yang meningkat.

"Pertambahan nilai ekspor Indonesia merupakan langkah awal untuk bisa memulihkan keadaan ekonomi disebabkan peperangan dalam negeri, misalnya Perang Aceh yang berakhir pada tahun 1904 yang ditandai berakhirnya pula konflik yang berkepanjangan, kalau diperkirakan sangat mengganggu karena sangat banyak menghabiskan biaya" (Prisma, No. 8. 1983 : 31).

Ekonomi Indonesia jauh lebih baik jika dibandingkan dengan masa sebelum adanya perluasan pertanian era Hindia Belanda yang bersifat kesatuan. Perang-perang lokal berakhir dan menyusullah perbaikan-perbaikan ekonomi. Perkembangan penting dalam bidang produksi eksport, baik di bidang pertanian maupun di bidang pertambangan bukan hanya meliputi perusahaan-perusahaan Barat saja, melainkan juga perusahaan-perusahaan kecil rakyat Indonesia (Prajudi Amosudirdjo, 1970 : 15).

"Pada permulaan abad ke 20, perkebunan melakukan perluasan-perluasan yang besar dan lebih dititik beratkan di daerah luar Jawa. Di samping penanaman tebu, di perluas juga jenis-jenis lain seperti perluasan perkebunan karet dan penanaman kelapa sawit. Perluasan itu untuk meningkatkan eksport hasil-hasil produksi yang sebagian besar adalah dengan munculnya penanaman karet rakyat di Sumatera" (Clifford Geertz, 1983 : 89).

Dengan adanya perluasan-perluasan dan peningkatan-peningkatan seperti di atas, maka kegiatan-kegiatan perkebunan semakin leluasa untuk bisa bergerak ke arah yang lebih menguntungkan. Kedudukan perkebunan menjadi lebih penting sehingga membutuhkan transportasi yang lebih baik pula, adanya bangunan-bangunan baru misalnya jalan kereta api, pelabuhan-pelabuhan modern untuk kelancaran pengangkutan hasil-hasil produksi. Itulah gambaran perekonomian Indonesia menjelang terjadinya malaise.

Sedangkan dalam bidang politik, sebelum malaise "orang-orang Indonesia telah memiliki pengalaman berorganisasi" (Prisma, No. 8. 1983 : 35). Hal ini merupakan modal yang paling berarti buat bangsa Indonesia dalam menghadapi masa krisis. Meskipun organisasi pertama Budi Utomo (1908) bukan organisasi politik, tetapi pada akhirnya juga menjurus dalam bidang politik. Semangat nasional telah tumbuh di dalam jiwa rakyat Indonesia untuk menghadapi tantangan politik di bawah Pemerintahan Hindia Belanda baik secara koperasi maupun non koperasi.

Indonesia mulai merasakan betapa beratnya pukulan krisis yang dialami mulai dari tahun 1929 sampai tahun 1930. Jatuhnya harga karet dirasakan langsung oleh pemerintah Hindia Belanda sebagai mayoritas pemilik perkebunan karet yang tiap 1,5 Kg berharga 54 sen turun menjadi 30,5 sen pada tahun 1930, 15 sen pada tahun 1931. pada tahun 1933 harganya sudah ada tanda-tanda subur kembali, namun harganya masih juga tetap rendah yaitu sebesar 11 sen per 0,5 Kg (Prisma, No.8. 1983 : 36). Di seluruh Indonesia sebagaimana ditunjukkan Werthein dalam Clifford Geertz (1983) kebanyakan hasil sasaran eksport diperbesar di luar pulau Jawa yang selalu meningkat sebelum terjadinya malaise. Menurut persentase diperhitungkan pertama sekali nilai eksport kira-kira 17% yaitu pada 1900, tahun 1920 menjadi 20%. Pada tahun 1930 nampak lebih meningkat lagi.

Perusahaan perkebunan swasta memegang peranan penting dalam bidang ekonomi eksport. Dari seluruh eksport luar pulau Jawa peranan mereka relatif lebih besar. Mereka telah mempunyai andil kira-kira 35 % yang terdiri dari sejumlah hasil produksi pertanian (bukan produksi pertambangan). Bila keadaan ini dibandingkan dengan Pulau Jawa kira-kira 15 % saja (Clifford Geertz, 1983 : 111). Krisis ekonomi di Pantai Timur Sumatera dalam masa malaise yaitu pada tahun 1930-an, menghancurkan struktur ekonomi. Semua ongkos produksi tidak dapat disesuaikan dengan pasar yang terus menerus merosot. "Peredaran uang juga mearasakan hal yang sama. Sejumlah orang-orang Eropa, pengusaha, pengacara, komunikasi dan

para dokter” (Prisma, No. 8. 1983 : 41), kesemuanya itu adalah salah satu faktor penyebab sulit untuk mendapatkan uang sebagai kebutuhan mereka untuk bisa bekerja sebagaimana mestinya. Kemunduran yang dialami hampir sama sekali kehilangan gerakan untuk mencapai titik puncak kesuburan ekonomi yang semakin hari semakin bertambah penduduknya dan semakin sukar untuk mendapatkan uang.

Di Yogyakarta, hal seperti ini hanya di alami pada jenis pertanian dan kerajinan baik kerajinan perak maupun kerajinan anyaman bambu, karena tidak sepenuhnya tergantung pada usaha perkebunan. Keaneka ragaman usaha penting artinya bagi Yogyakarta, ketika malaise tiba, kesulitan uang meningkat, sehingga uang yang diperoleh hanyalah cukup sebagai kebutuhan hidup ala kadarnya. Untuk jenis gula di Yogyakarta biasanya tanaman tebu mencapai 17.594 hektar menyusut menjadi 13.697 hektar. Pada tahun 1931 merosot lagi menjadi 6.449 hektar. Pada tahun 1932 hanya tinggal 1.110 hektar dan pada tahun berikutnya sudah mulai naik sedikit sampai 2.000 hektar yaitu pada tahun 1934. dengan demikian rakyat di daerah gula merosot pendapatannya dari total sekitar f. 8,3 juta (ukuran normal) menjadi sekitar f. 2,3 juta pada tahun 1933 (Prisma, No. 8. 1983 : 44).

Setelah kita melihat dua daerah di Indonesia yakni di Pantai Timur dan Yogyakarta, maka kita akan melihat pula salah satu desa di Jawa yaitu Desa Ngablak (Kabupaten Pati) yang terletak pada jalan raya antara Tayu dan Jepara. Di pedesaan ini pada masa malaise sangat berpengaruh besar dalam bidang pertanian, yaitu turunya hasil-hasil pertanian dan hal-hal yang berhubungan dengan berkurangnya pendapatan rakyat, karena daerah ini banyak di tanami kapok. Maka hal yang di alami adalah kemerosotan harga dalam per 1.000 buah menurun dari f. 5.50 pada tahun 1926 sampai f. 1,20 dan berturut-turut dalam tahun 1931 dan 1932 hanya tinggal f. 1, sehingga sampai hal berupa zakat yang diperoleh dari perdagangan pada sekitar tahun 1930 tidak satupun lagi yang memenuhi persyaratan wajib zakat (Sediono M.P. Tjondronegoro dan Gunawan Wiradi, 1984 : 100).

Pihak Pemerintah Hindia Belanda terus memperhatikan reaksi dari krisis 1930, dengan cepat mereka membaca situasi untuk menggerakkan langkah selanjutnya apa yang telah terjadi di Indonesia. Usaha yang dilakukan pemerintah adalah dengan menaikkan harga yang rendah dengan menambah output hasil dan menambah produksi pertanian, sehingga antara nilai ekspor dengan import menjadi tidak seimbang (J.S. Furnivall, 1976 : 429), sebab terjadinya suatu Pembatasan penjualan yang mereka lakukan untuk membendung arus ekonomi. Akhirnya apa yang telah direncanakan jauh dari kenyataan untuk membendung arus ekonomi yang demikian hebat. Terjadilah bermacam-macam gejala seperti kelebihan produksi, harga yang tidak stabil walaupun harga yang direncanakan itu tinggi, namun daya beli sangat minim. Para konsumen tidak sanggup menjangkau harga barang tersebut.

B. Akibat Terhadap Rakyat Indonesia

Tekanan ekonomi Pemerintah Hindia Belanda terhadap rakyat Indonesia memang tidak asing lagi. Bila dibicarakan sekitar tahun 1930-an, posisi ekonomi selalu terancam krisis yang berakar pada Perang Dunia I dan berlangsung sedikit demi sedikit, sekaligus dialami oleh beberapa negara di Eropa yang akhirnya juga sampai ke Indonesia.

"Selama Pemerintah Hindia Belanda masih menjalankan pemerintahannya di muka bumi Indonesia ini. Hasil apapun juga akan bergerak di bawah tangannya pula, apalagi soal ekonomi krisis, tekanan ekonomi ternyata pada tahun 1930, kemelaratan rakyat Indonesia tidak dapat dibendung lagi" (Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Jawa Timur, 1977/1978 : 172).

Efek yang timbul akibat malaise, misalnya terjadi pengangguran. Pada umumnya pemberhentian buruh-buruh dilakukan oleh pemerintah untuk memperkecil bayaran upah, agar kemungkinan terjadi kebangkitan ekonomi kembali. Kebanyakan kebijakan ini dilakukan oleh perusahaan perkebunan untuk menekan para kuli. Namun dampaknya bukan saja pada para buruh, tetapi juga terjadi pengurangan tenaga kerja di pihak pegawai administrasi dan pengawas.

"Sebanyak 42 %, mereka merupakan bahagian yang terkecil dari keseluruhan tenaga kerja perkebunan. Pada hakikatnya 80 % dari jumlah kuli yang mencapai 335.000 orang adalah kuli kontrak dan pada tahun 1930 kontraknya itu masih terikat dengan pidana, karena sebelum tahun 1930 untuk tenaga kuli sukar didapat di Pulau Jawa (Prisma, No. 8. 1983 : 40).

Kesempatan kerja bila dibandingkan dengan sebelumnya jauh lebih berarti. Dahulu pihak pemerintah mencari tenaga kerja dengan suatu hubungan kontrak ancamannya pidana. "Pada masa malaise terjadi pengurangan tenaga kerja baik dari pihak pemerintah maupun di pihak partikelir" (Aboe Bakar, 1979 : 50). Dengan demikian masa-masa yang buruk telah menghampiri para pekerja di perusahaan-perusahaan dan masa yang buruk itu pula telah memaksa segala jenis perusahaan dan perkebunan untuk melakukan penghematan dengan jalan memberhentikan pekerja-pekerja.

Efek lain juga timbul dengan bertambahnya jumlah penduduk tiap-tiap tahun. Kalau sebelumnya pada akhir abad ke 19 nilai ekspor hampir seluruhnya dipelopori oleh perusahaan-perusahaan pertanian Barat akan tetapi kemudian jumlah penduduk bertambah, maka nilai ekspor pada tahun 1926 kebanyakan dari hasil pertanian rakyat (Prajudi Atmosudirdjo, 1970 : 115). Tidak lama kemudian malaise tiba, nilai ekspor dalam persen masih tetap naik. "Kelebihan ekspor tidak berarti sama sekali karena adanya penurunan harga pasaran barang-barang ekspor yang sangat rendah baik dilihat dari sisi, tepi, dan batas" (J.S. Furnivall, 1976 : 429).

"Depresi dalam tahun 1930-an mempengaruhi pula jumlah penanaman modal asing yang kian merosot. Apabila dilihat dari tahun 1926 sampai tahun 1930 berjumlah f. 261.000.000, kemudian dari tahun 1931 sampai 1935 berjumlah f. 18.000.000 dan dari tahun 1936 sampai tahun 1938 sudah mulai nampak bangkit kembali menjadi f. 114.000.000 (Prajudi Atmosudirdjo, 1970 : 151).

Dengan adanya hambatan-hambatan ekonomi baik berupa harga yang tidak stabil dari harga ekspor import maupun dari segi peredaran uang yang sempit dan juga menimbulkan pengangguran tenaga kerja di perusahaan-perusahaan. Keseluruhan ini dapat dirasakan langsung oleh penduduk yang ada di Indonesia, lebih-lebih penduduk asli Indonesia.

Uraian di atas menunjukkan betapa beratnya rakyat Indonesia mengalami masalah krisis ekonomi, tiap-tiap daerah di Indonesia turut merasakannya. Seperti halnya yang terjadi di Aceh, produksi perkebunan rakyat di Aceh merosot, misalnya

karet, pinang, kopra, beras. Kalau dilihat dari nilai harga, salah satu diantaranya adalah beras. Harga beras pada tahun-tahun sebelum terjadinya krisis ekonomi dunia (masa malaise) di Aceh tiap-tiap 100 Kg berharga f. 15. kemudian menjelang tahun krisis turun f.10 dan pada tahun 1932 harganya turun lagi yang berkisar antara f. 6 dan f. 8 (Rusdi Sufi, 1980 : 13). Kemudian dari pada itu harga pertanian lainnya juga merosot, barang-barang import di Aceh turun rendah sekali, namun daya beli juga rendah, karena diadakannya pengurangan gaji dan pemotongan upah-upah sekaligus dengan kenaikan pajak-pajak yang harus mereka bayar dalam rangka untuk meningkatkan pemasukan kas Pemerintah Hindia Belanda.

Di Yogyakarta pada masa ini ada yang mengalami kelaparan, karena harus membayar pajak untuk pemerintah. Sedangkan pajak yang dibayar mereka harus menjual hasil panennya untuk menutupi pembiayaan pajak tersebut, sehingga sisanya tidak cukup untuk dimakan sampai menunggu masa panen lagi (Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Yogyakarta, 1977/1978 : 125). Karena harus menjual hasil panen mereka, bahaya kelaparan pun terjadi di mana-mana, terutama daerah yang berpenghasilan rendah.

"Antara tahun 1930-1933 di Yogyakarta pernah terjadi di kalangan rakyat-rakyat biasa yaitu suatu sistem menjual tanamannya waktu masih hijau karena tidak tahan lagi bahaya kelaparan yang telah mengancam dirinya sendiri. Kelaparan berkecamuk di daerah minus, kemiskinan merayap dalam tubuh masyarakat desa, kadang-kadang ada yang meninggal dunia akibat kelaparan" (sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta, 1977/1978: 126).

Perbandingan antara Sumatera dan Jawa yaitu Aceh dan Yogyakarta dapat dilihat pada penderitaan rakyat, kuli kontrak maupun yang bekerja sebagai guru pada sekolah Belanda turut juga menderita akibat terjadinya penghematan dengan memberhentikannya. Penderitaan itu lebih berat dirasakan di Jawa dari pada di Sumatera karena kebanyakan kuli kontrak berasal dari Jawa, setelah dipulangkan ke Jawa mereka itu jadi pengangguran. Kebanyakan yang dirasakan oleh rakyat Indonesia turut juga mempengaruhi daerahnya masing-masing sesuai dengan keadaan alam setempat yaitu bertalian dengan struktur daerah itu sendiri dimana sama-sama menderita dan berbagai reaksi yang ditempuh dalam menghadapi krisis ekonomi masing-masing. Jadi jelaslah dari rakyat Indonesia sebagai negara agraris pada tahun 1930 ketika depresi ekonomi terjadi. Kebetulan sekali banyak rakyat-rakyat Indonesia terlibat dalam perusahaan-perusahaan perkebunan milik pemerintah maupun swasta, namun bukan seluruhnya perusahaan perkebunan, akan tetapi ada juga perusahaan pertambangan.

Prajudi Atmosudirdjo (1970: 202) menyatakan dalam berbagai krisis ekonomi, "bagi barang-barang industri dan barang-barang hasil pertanian terutama adalah kemerosotan harga yang menimpa dirinya dan menimbulkan bertumpuknya persediaan barang yang tidak terjual, sedangkan produksi tidak berkurang". Dengan demikian bagi Indonesia sebagai daerah agraris serta penghasil bahan mentah depresi itu telah menimbulkan suatu kejatuhan harga yang amat merusak serta menumpuknya persediaan-persediaan yang tidak dapat dijual, seperti gula, karet dan timah.

Memang dari segi hargalah yang lebih menonjol dapat dirasakan oleh pemerintah Hindia Belanda serta segenap rakyat Indonesia untuk semua jenis barang produksi. Semangat kemakmuran semakin mundur, hasrat untuk bersaing

dalam melawan krisis ekonomi memang ada, namun semua itu tidak berarti baginya karena harganya terlalu rendah (J.S. Furnivall, 1976: 429). Bila hal ini dilihat kembali dalam tahun 1900 yang mempunyai semangat kemakmuran dari hasil-hasil produksi lebih meningkat dari tahun ke tahun dan harganya pun seimbang.

C. Malaise Dan Pengaruhnya Terhadap Pergerakan Nasional

1. Gejolak Sosial Ekonomi

Ciri-ciri dari kehidupan perekonomian baru yang sedang dalam pertumbuhan di mulai ketika memasuki abad ke 20 dimana kaum buruh merupakan golongan sosial tersendiri dalam masyarakat baik yang tinggal di kota maupun di desa (Prisma, No. 11. 1985:27). Mereka ini tidak terlepas dari kelompok tersendiri dimana tempat mereka bekerja. Timbulnya gejolak sosial ekonomi akibat adanya jurang pemisah antara kelas bawahan dengan kelas atasan, kelas rendah atau kelas buruh dengan kelas majikan dan antara golongan buruh dengan pemerintah. Pihak majikan menghendaki keuntungan besar yang diperoleh dari hasil-hasil produksi maupun yang bukan produksi tanpa menghiraukan jerih payah orang lain yang tidak setimpal dengan tenaga yang dikeluarkan oleh kaum buruh. Sebaliknya, kaum buruh juga menuntut hak untuk perbaikan nasib mereka dengan ancaman melakukan aksi-aksi pemogokan lewat organisasi-organisasi Serikat Pekerja.

Kepincangan dan ketidakadilan antara kaum buruh dengan kaum modal timbullah bermacam-macam reaksi dari kaum buruh untuk melawan tindakan penguasa yang tidak adil dan merasa masa depan hidupnya dalam keadaan sempit. Mereka melancarkan aksi-aksi protes untuk menuntut perbaikan. Upaya ini dilakukan lewat organisasi-organisasi antara nasional rasikal, para petani dan buruh (Prisma, No. 8. 1983: 47). Dalam gejolak sosial ekonomi yang demikian rupa antara golongan buruh dengan golongan majikan dan yang lebih dominan lagi adalah Pemerintah Hindia Belanda sebagai mayoritas penguasa perusahaan-perusahaan baik perusahaan pemerintah maupun perusahaan swasta.

Deliar Noer (1980: 158) mencoba menganalisis keadaan ini dengan menyebutkan bahwa :

"Partai Serikat Islam mencoba, bahkan memikirkan pemecahan persoalan ekonomi dan sosial. kemunduran Indonesia dalam bidang ekonomi dilihat sebagai akibat perbedaan kepentingan antara Indonesia dan Eropa yang diwakili oleh golongan kapitalis. Ini menjadi sebab bangsa Indonesia hilang kemerdekaannya, jatuh di dalam kenistaan dan kenistaan perhambaan pencarian. Perusahaan-perusahaan besar hendaklah di tangan pemerintah dengan pengawasan rakyat. Serikat-serikat sekerja hendaklah dibangun".

Apa yang dinyatakan Deliar Noer memang ada benarnya jika dilihat wadah suatu organisasi yang selalu memikirkan kepentingan sosial kultural dan sosial ekonomi yang di dalamnya tumbuh perasaan senasib dan sepenanggungan, apa lagi di dalam lingkungan pemerintahan. Sebenarnya "pabrik-pabrik dan perusahaan-perusahaan merupakan tempat penampungan atau terhimpunnya tenaga kerja atau buruh sebagai individu untuk kepentingan bersama. Di dalam itu pula menciptakan situasi kelompok sosial yang statis" (Prisma, No. 11. 1985: 27). Dilihat dari sistem organisasi memang yang dikehendaki adalah demikian, akan tetapi pola pelaksanaannya dan pemikiran pihak kaum modal menyimpang dari apa yang diharapkan oleh sebuah organisasi, seandainya penyimpangan itu tidak terjadi gejolak sosialpun tidak akan ada. Persoalan ekonomi dan sosial bila di hubungkan

dengan pedoman-pedoman yang bersifat etis atau lebih dikenal dengan memperhatikan jasa bawahannya (Deliar Noer, 1980: 158). Kalau hal itu tidak diperhatikan, memang sudah sewajarnya terjadi serentetan peristiwa-peristiwa berupa kerusuhan atau pergolakan sosial yang didukung oleh rakyat yang bersifat agresif dan radikal, yang sekaligus mencerminkan ledakan ketegangan baik sosial maupun ekonomi. Kesemuanya itu menunjukkan bahwa gerakan-gerakan yang didukung oleh kaum petani atau buruh merupakan aktivitas yang ditunjukkan untuk melakukan perubahan-perubahan yang merugikan mereka.

Selanjutnya Djoko Suryo mengatakan bahwa "dominasi politik kolonial Barat yang menimbulkan perubahan sosial telah menciptakan kondisi yang memungkinkan lahirnya pergolakan sosial. Penetrasi ekonomi, politik dan kebudayaan Barat yang terjadi pada masa kolonial telah mengakibatkan runtuhnya tata kehidupan sosial ekonomi disertai dengan pelaksanaan tenaga kerja wajib" (Prisma, No. 11. 1985: 16-17). Sejalan dengan kerja rodi atau upah perburuhan dan sekaligus dengan upah yang pernah masuk kepada mereka selama dasawarsa kedua, lebih-lebih dasawarsa ketiga membawa efek yang buruk bagi pekerja karena upah merosot lebih separuh dari volume lapangan kerja menyusut samapai tinggal sedikit pada masa malaise (James C. Scott, 1983: 175). Dengan demikian jurang pemisah antara kaum buruh dan kaum modal atau jarak sosial yang jauh antara keduanya sehingga menimbulkan bermacam-macam aksi dan perubahan-perubahan sosial ekonomi. Secara umum dapat dikatakan bahwa faktor-faktor sosial, ekonomi, politik dan kultural sangat mempengaruhi timbulnya gejala-gejala atau pergolakan sosial di kalangan masyarakat dan pekerja-pekerja yang merupakan reaksi spontan terhadap perubahan-perubahan sosial ekonomi yang cepat dan mengakibatkan pula di kalangan mereka yang menjadi prustasi dalam kehidupannya sehingga mereka melakukan pemberontakan.

2. Aksi-Aksi Politik

Perang Dunia I mengakibatkan kehancuran ekonomi di berbagai Negara Eropa dan sekaligus dengan kehancuran perekonomian dunia pada umumnya. Setelah Perang Dunia I berakhir terjadilah depresi ekonomi, termasuk pula di Indonesia. Harga barang eksport Indonesia naik sedangkan upah buruh tidak mengalami perbaikan (A.K. Pringgodigdo, 1980: 13). Akibatnya kehidupan kaum buruh yang diharapkan sebagai motor perusahaan menjadi lemah dan upah yang diterima tidak setimpal dengan harga barang. Sebaliknya "pengekspor Indonesia memperoleh keuntungan dengan adanya permintaan besar akan hasil-hasil dari Indonesia terkutama bahan mentah untuk kepentingan industri di Eropa" (Prajudi Atmosudirdjo, 1970: 14).

Kepincangan dan ketidakadilan antara kaum modal dan kaum buruh mengakibatkan adanya suatu perbedaan sosial ekonomi yang jauh. Pihak kaum buruh keadaan seperti ini merasa dirinya telah dirugikan oleh kaum modal, sehingga terjadilah bermacam-macam reaksi yang dilontarkan oleh kaum buruh sebagai protes atas gajinya yang sangat rendah. Sejumlah kaum buruh pada waktu itu telah mengorganisir dirinya dalam organisasi-organisasi Serikat Sekerja masing-masing Perkumpulan itulah dapat menimbulkan pikiran kaum buruh untuk memperbaiki kedudukan dengan cara berorganisasi.

Pada umumnya gerakan buruh di Indonesia sangat erat hubungannya dengan gerakan partai-partai politik. Kalau kaum buruh cenderung menentang kapitalisme dalam bidang ekonomi, maka partai politik menentang imperialisme dalam bidang

politik (Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta, 1977/1978: 69). Kedua gerakan ini adalah sejalan dalam rangka sama-sama memperjuangkan kepentingan bersama. Contohnya Serikat Islam, yang salah satu tujuan organisasi adalah memajukan kepentingan rohani dan jasmani penduduk asli. Namun pada dasarnya Serikat Islam bukanlah organisasi politik, tetapi akhirnya menjurus dalam bidang politik sebagai reaksi sikap dari pada kapitalisme dan menginginkan pemerintahan sendiri sebagai tujuan perjuangan terhadap penjajahan (Susanto Tirtoprodjo, 1980: 30).

Upah buruh di Indonesia yang sangat rendah, wajar apabila aksi-aksi pemogokan sebagai protes terhadap kaum modal. Kaum buiruh selalu mengharapkan agar nasibnya bisa terlepas dari belenggu ekonomi kaum penjajah. Dalam keadaan serupa ini juga organisasi lain memanfaatkan aksi-aksi politiknya dalam tubuh organisasi Partai Serikat Sekerja. Di beberapa tempat organisasi Partai Komunis Indonesia (PKI) mencoba melakukan pemogokan. Mereka berpendapat bahwa salah satu jalan yang dilakukan untuk perbaikan nasib kaum buruh adalah dengan pemogokan.

Dalam bulan Nopember 1920 di Surabaya timbul pemogokan yang luas juga disebabkan karena upah tidak disesuaikan dengan naiknya harga barang-barang. Pemogokan terjadi di perusahaan-perusahaan penjahit, di pelabuhan dan perusahaan teknik (A.K. Pringgodigdo, 1980: 84). Sehubungan dengan aksi-aksi politik yang dijalankan rakyat Indonesia melalui organisasi-organisasi Serikat Sekerja. Antara tahun 1920-1925 adalah masa aksi pemogokan kaum buruh di Indonesia. Di tengah-tengah kesulitan ekonomi seperti ini maka dengan mudah propaganda-propaganda yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia dan Serikat Islam bisa domasukkan, terutama pada kaum buruh dan kaum tani yang berada dalam naungan organisasi-organisasi yang berhaluan komunis, Serikat Rakyat, Serikat Buruh Kereta Api, mereka itu selalu menuntut supaya nasib para anggotanya dalam waktu singkat harus diperbaiki (Susanto Tirtoprodjo, 1980; 46).

Selama ini antara SI dan PKI selalu bersaing untuk mendapat pengaruh lebih besardan selalu menyusup ke dalam kaum buruh yang bekerja di pelabuhan dan terus melakukan pemogokan-pemogokan baik yang bersifat menuntut hak maupun bertujuan memperoleh kemerdekaan. Perjuangan yang dilakukan oleh PKI merupakan perjuangan politik melalui bermacam-macam metode dengan tujuan agar mereka mendapat dukungan besar. Dengan program perjuangan politiknya menunjukkan sistem pemerintahan yang diarahkan ke Sovyet. Di samping itu PKI sangat berambisi untuk mengambil alih kekuasaan dan memerintah di bawah tangannya sendiri yang berkiblat ke Moskow dalam segala sesuatu hal yang bersifat pemerintahan. Sementara itu, di Aceh juga pernah terjadi suatu pemberontakan Kapal Tujuh (De Zeven Provincien) pada tanggal 4 Februari 1933 di Ulee lhe (Aceh) akibat dari tekanan ekonomi dunia. Kerusakan tersebut timbul di kalangan pelaut pribumi dan Belanda yang berpusat di Surabaya karena terjadi pemotongan gaji pegawai, termasuk militer (Selecta, No. 907. 1979: 38).

3. Hubungan Dengan Pergerakan Nasional

Perkembangan ekonomi Indonesia memang selayaknya ada dalam dasawarsa antara tahun 1900-1920. Dengan adanya usaha perluasan-perluasan areal perkebunan dan peningkatan hasil-hasil produksi barang ekspor dari Indonesia untuk kebutuhan luar negeri (Negara-negara Eropa). Bila dilihat pasca Perang Dunia I, kolonial Belanda selalu menjual hasil industrinya di daerah

jajahannya. Hal itu berarti menghalang-halangi pertumbuhan industri Indonesia selanjutnya, bahkan industri milik pribumi merupakan saingan yang paling berat sehingga banyak yang harus ditutup dan mengakibatkan kaum buruh menganggur (Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Jawa Timur, 1977/1978: 129). Usaha-usaha yang dilakukan kaum pribumi agar bisa merasakan kelayakan hidup sama dengan orang-orang asing tidak terwujud. Hal ini dikarenakan banyak usaha kaum pribumi yang mengalami kerugian akibat krisis ekonomi dunia.

Susanto Tirtoprodjo (1980: 36) menyatakan bahwa : "Organisasi SI, bekerja keras dalam membantu kesulitan ekonomi baik para anggotanya sendiri maupun para penduduk pribumi lainnya dengan menentang kapitalisme sebagai sebab dari penjajahan. Sebab itulah yang sering terjadi pada para kaum buruh di bawah organisasi nasionalis radikal dengan melakukan aksi politik untuk mencapai tujuannya masing-masing. Kalau kaum buruh aksi-aksi politik yang dilakukannya berhubungan dengan perbaikan nasib. Sedangkan Serikat Islam di samping membantu penduduk pribumi juga mempunyai tujuan lain yaitu mewujudkan pemerintahan sendiri, sehingga pada tahun 1927 Serikat Islam menegaskan bahwa partainya bertujuan untuk mencapai kemerdekaan nasional atas dasar agama Islam (Susanto Tirtiprodjo, 1980: 38).

Sehubungan dengan terjadinya aksi-aksi politik dalam masa malaise di tahun 1930-an, banyak perjuangan para tokoh Pergerakan Nasional menuntut Pemerintah Hindia Belanda hendaknya memikirkan hal ini. Namun Pemerintah Hindia Belanda sebagaimana pernah dimuat pada majalah *Selecta*, No. 907 (1979:38) pemerintah tidak mau menambah gaji para pegawai, bahkan terjadi pemotongan. Usaha-usaha pemerintah yang pernah dilakukan adalah kebijakan penghematan. Salah satu diantaranya adalah upaya penghematan uang melalui pemotongan gaji para pegawai termasuk militer. Inilah salah satu dorongan utama timbulnya kerusuhan-kerusuhan yang digerakkan oleh para pelaut menentang tindakan pemerintah. Kerusuhan tersebut adalah datang dari kalangan pelaut pribumi dan Belanda yang berpusat di Surabaya. Kerusuhan ini dikenal dengan pemerontakan Kapal Tujuh (Dengon Zeven Provincien), karena terjadi pada Dinas Angkatan Laut Hindia Belanda di Surabaya yaitu pada permulaan tahun 1933. Lebih lanjut *Selecta* No.907 (1979:9). kejadian ini tidak meletus secara tiba-tiba akan tetapi telah dipersiapkan sebelumnya secara matang dan tidak berdiri sendiri, melainkan ada hubungannya dengan sudut Pergerakan Nasional yang ketika itu sedang hebatnya digalakkan oleh tokoh-tokoh pergerakan Kebangsaan Indonesia.

Menghadapi perlawanan yang datang dari bangsa Indonesia selama masa depresi dan malaise, sikap Pemerintah Hindia Belanda semakin keras, lebih-lebih terhadap partai-partai politik selain perlawanan kaum petani dan buruh seperti Partai Nasional Indonesia (PNI) dan Partai Serikat Islam Indonesia (PSII). Sikap keras Pemerintah Hindia Belanda terhadap partai-partai politik bukan berarti suatu penghalang bagi bangsa Indonesia, melainkan juga sebagai cambuk untuk mencapai tujuan. Semangat kebangsaan semakin berkobar, lebih-lebih setelah hadirnya Pendidikan Nasional Indonesia (PNI-baru) yang menggantikan PNI-lama karena dianggap telah macet akibat ditangkapnya Soekarno dan sedikitnya anggota PNI yang paham akan partainya beserta tujuan perjuangannya. PNI-baru bertujuan sama dengan PNI-lama dan begitu pula dengan jenis perjuangannya yaitu mencapai tujuan Indonesia merdeka. Sementara PNI-baru dipimpin oleh dua orang tokoh yang berasal Sumatera dan masih belajar di negeri Belanda di masa jayanya PNI-lama. Kedua orang itu adalah Sutan Syahrir dan Muhammad Hatta. Mereka melihat bahwa

PNI-lama tidak bisa lagi melakukan kegiatan-kegiatan politik karena ditangkapnya beberapa tokoh yaitu Soekarno, Maskun, Supriadinata dan Gotot Mangkupradja (Prisma, No. 8. 1983: 38). Karena sikap keras itu timbul, maka lahirlah gaya baru dalam wajah politik ekonomi bangsa Indonesia. Kalau sebelumnya bersifat non koperasi kini haluannya menjadi "koperasi modern" atau setidaknya bersifat perbandingan dengan ikut sertanya dewan-dewan Hindia Belanda seperti yang ditempuh oleh Budi Utomo.

Para tokoh Pergerakan Nasional memanfaatkan peluang ini dengan baik, aksi-aksi politik terus dilakukan untuk membebaskan rakyatnya dari belenggu penjajahan. Bersama rakyat terus melanjutkan perjuangan sebagaimana mestinya, walaupun membawa maut untuk dirinya sendiri, rakyat Indonesia telah bertekad bulat dalam medan perjuangan. Sedangkan pihak Pemerintah Hindia Belanda terus menghadapi perlawanan rakyat, baik politik maupun ekonomi yang sedang dalam perjalanan krisis pada tahun 1930-an. Di samping pemerintah memperhatikan masalah ekonomi turut juga memperhatikan kerusuhan-kerusuhan politik yang dilancarkan oleh para Pergerakan Nasional Indonesia. Di satu pihak malaise merupakan peluang untuk meneruskan perjuangan kemerdekaan. Akan tetapi di lain pihak merupakan hambatan besar untuk memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya. Bagi rakyat kecil di pedesaan malaise membuat mereka jatuh melarat dan sengsara. Mereka menjadi miskin akibat ulah bangsa penjajah tanpa memperhatikan rakyat jajahan. Bagi tokoh-tokoh pergerakan masa malaise dipergunakan untuk melancarkan serangan balasan terhadap pemerintah secara politik. Dalam konteks tersebut Pemerintah Hindia Belanda menghadapi dua macam persoalan sekaligus. Pertama persoalan ekonomi, pemerintah secara aktif mengatasi masalah malaise. Kedua persoalan politik, yaitu berusaha menghadapi perlawanan rakyat Indonesia dalam berbagai tuntutan dan aksi-aksi politik. Ekses dari fenomena tersebut, terutama tokoh-tokoh Nasionalis Indonesia melalui organisasi-organisasi politik terus melakukan upaya pemogokan secara besar-besaran yang dilakukan kaum buruh terhadap pemerintah kolonial Belanda. Pemogokan tersebut merupakan salah satu bentuk perjuangan bangsa Indonesia menentang kolonialisme Belanda.

IV. Penutup

Krisis ekonomi dunia merupakan tragedi yang terjadi setelah Perang Dunia I berakhir dan mengakibatkan negara-negara yang terlibat dalam kancah peperangan dan kehilangan sebahagian besar prajurit yang merupakan modal utama dalam pembangunan. Di Indonesia malaise mengakibatkan identitas ekonomi rakyat kehilangan pegangan karena perlakuan. Pihak pemerintah hanya untuk mengambil keuntungannya sendiri tanpa menghiraukan peranan dan jasa buruh dalam sebuah perusahaan dan tidak wajar pula jumlah pendapatan buruh dengan harga barang-barang kebutuhan hidup. Akibat malaise, persatuan rakyat semakin kuat, menyebabkan munculnya berbagai pemberontakan dan aksi politik lainnya yang dilakukan oleh kaum buruh melalui oerorganisasi Pergerakan Nasional terhadap pemerintah Kolonial Bealanda. Usaha-uasaha organisasi buruh dalam melepaskan diri dari belenggu ekonomi dam politik kolonial Belanda selalu mendapat hambatan-hambatan dari Pemerintah Hindia Belanda.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmosudirdjo, Prajudi. 1970. *Sejarah Ekonomis Sosialogis Indonesia*, Jilid II. Jakarta : Pradnja Paramita.
- Bakar, Aboe. 1979, *Memori Umum Daerah Aceh Oleh Gubernur HNA Swart Dan Memori Serah Terima Jabatan Gubernur AH Philips.* Banda Aceh : Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh.
- Furnivall, J S. 1976. *Netherlands Indie, a study of plural economy*. Amterdam : B.M. Israel BV.
- Geertz, Clifford. 1983. *Involusi Pertanian*. Jakarta : Bhratara Karya Aksara.
- James C. Scott, 1983. *Moral Ekonomi Petani*. Jakarta : LP3ES.
- Noer, Deliar. 1980. *Gerakan Moderen Islam Di Indonesia 1900-1942*. Jakarta : LP3ES.
- Pringgodigdo, AK. 1980. *Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia*. Jakarta : Dian Rakyat.
- Proyek Penelitian Dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, 1977/1978. *Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta*. Proyek Penelitian Dan Pencatatan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- _____, 1977/1978. *Sejarah Kebangkitan Nasional Ddaerah Jawa Timur*. Proyek Penelitian Dan Pencatatan Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan.
- Sufi, Rusdi. 1980. *Beberapa Catatan Tentang Daerah Aceh Tahun 1828-1942*. Banda Aceh : Toko Buku Mita Rezeki.
- Sediono MP. Tjondronegoro dan Wiradi, Gunawan. 1984. *Dua Abad Penguasaan Tanah, Penyunting*. Jakarta : Gramedia.
- Soebantardjo, 1960. *Sari Sejarah*. Jilid II. Yogyakarta : Bopkri.
- Soekarno, 1965. *Di Bawah Bendera Revolusi*, Jilid I. Panitia Di Bawah Bendera Revolusi.
- Susanto Tirtoprodjo, 1980. *Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia*. Jakarta : Pembangunan.
- Warsid, Suroyo. 1953. *Sejarah Pererkonomian Sedunia*. Jakarta : Saksama.
- Rahman, Aulia dan Hanafiah. 2014. "Sejarah untuk Kedaulatan Bangsa: Studi Kasus di Aceh", *Seuneubok Lada*. Vol. 1, No. 1, Januari-Juni 2014.
- Prisma, 1983. No. 8. Jakarta : LP3ES.
- _____, 1985. No. 11. Jakarta : LP3ES.
- Selecta, 1979. No. 907.